BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan terhadap pembangunan di Kota Batam lebih mengarah kepada bangunan, pendidikan, infrastruktur ,sarana dan fasilitas. Tujuan dari pembangunan tersebut untuk memberikan kesempatan lapangan kerja kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatannya. Pemberian kewenangan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur Otonomi Daerah dalam perkembangan daerahnya. Seiring dengan berkembangnya daerah tersebut maka masih ditemukan kendala keuangan khususnya sumber-sumber keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pembangunan daerah memerlukan sumber pembiayaan dalam pelaksanaannya. Adapun sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut bisa berasal dari APBN dan APBD. APBD yang terdiri dari PAD, BUMD dan usaha-usaha lainnya, DAU, DAK , Dana Hibah, Dana Darurat, Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah dan Dana Penyesuaian. Salah satu unsur penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berasal dari PAD, pendapatan tersebut terdiri dari Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan penerimaan lainnya.

Retribusi daerah terbagi atas tiga golongan, yakni (Jufrizen, 2013): 1. Retribusi jasa umum; 2. Retribusi jasa usaha; 3. Retribusi perizinan tertentu. Dalam UU No. 28/2009 di Pasal 110 sampai Pasal 124, jenis-jenis retribusi jasa

umum. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi parkir terdapat dalam Pasal 110 (a) 1 Mengenai Huruf E yang termasuk jenis retribusi jasa umum, jasa umum dimaksudkan disini merupakan jenis retribusi yang ditagihkan pada setiap penempatan parkir sehingga memiliki sesuatu yang besar dalam rangka menyanggah PAD. Pemungutan retribusi parkir di Indonesia diatur dalam UU No. 18/1997 dan sistem pemungutannya di atur pada Pasal 26 dimana tidak mungkin diborongkan pemungutan retribusi yang artinya seluruh proses dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang artinya seluruh proses dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Pengertian di atas bukanlah menghambat pihak ketiga saling bekerjasama dengan pemerintah tetapi dibutuhkan selektif dalam proses pemungutan retribusi. Keefisienan pekerjaan pemerintah dapat dilakukan dengan badan badan lainnya agar dapat dipercaya terhadap keprofesionalismeannya. Mengenai pengertian retribusi daerah terdapat di dalam pasal 1 UU No. 28/2009, dan di dalam pasal ini menyebutkan jasa tertentu yang diberikan oleh negara bersifat langsung maksudnya yaitu fasilitas Negara dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum. "Setiap orang yang menggunakan jasa atau melakukan pengurusan perizinan wajib membayar pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tertentu yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah".

“Pungutan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait”. Untuk mendapatkan kepastian hukum maka aturan yang dibuat oleh pemerintah dapat dipaksakan kepada masyarakat. Selain itu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan agar adanya jaminan kejujuran dan integritas pemungut, serta jaminan dari pungutan tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat.

“Berdasarkan UU No. 28/2009 pemerintah memberikan jaminan terhadap aturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, di tingkat daerah pajak dan retribusi diatur dalam peraturan daerahnya masing-masing”. Pengelolaan parkir diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2018 dikeluarkannya PERDA No.3/2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. “Cukup tinggi-tingginya penggunaan kendaraan bermotor dan mobil dapat diketahui dari peningkatan volume kendaraan yang setiap hari memadati jalan raya dilihat dari keefektifan jalan raya dihari kerja”. Lebih parah lagi kondisi tersebut, dengan adanya parkir liar yang dilakukan pihak-pihak masyarakat di beberapa lokasi. Hal ini hanya dapat diatasi oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang. Salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan parkir yang memadai, serta lainnya yang dapat dinikmati masyarakat. Pelayanan parkir yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal, maka diharapkan agar diadakan oleh pemerintah berupa evaluasi seperti strategi yang diatur di dalam peraturan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir,

serta meningkatkan PAD secara maksimal. Berangkat dari masalah tersebut Pemerintah Kota Batam berkerjasama dengan Dispenda Provinsi Kepulauan Riau membuat suatu program “Retribusi Parkir Berlangganan” menurut aturan Perda No.3/2018 tentang retribusi parkir. Perda mengenai pelayanan retribusi parkir, penyelenggaraannya telah sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Robert Eystone (Taufiqurokhman, 2014). Teori yang dinyatakan oleh Robert adalah sebagai berikut *“policy is a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or a matter of concern”* yang maksudnya adalah “Pemecahan suatu masalah tertentu merupakan tindakan dari serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku yang memecahkan suatu masalah tertentu”

Tindakan yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap peningkatan pelayanan fasilitas parkir cendrung untuk menertibkan masyarakat dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menjalankan peranan dalam mengembangkan potensi daerahnya untuk meningkatkan penerimaan daerah agar dapat menjalankan tugasnya dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.

“Di Kota Batam mengenai parkir berlangganan merupakan salah satu dari pelaksanaan terhadap penerapan pemungutan retribusi peningkatan PAD dari

adanya otonomi daerah. Perolehan dana dari retribusi parkir berlangganan dan parkir lainnya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah meskipun dari parkir tersebut tidak terlalu banyak memberikan kontribusi. Kebijakan pemerintah berdasarkan daerah masing-masing, khususnya di Kota Batam mengupayakan beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan dan upaya lainnya untuk peningkatan pendapatan daerah. Implementasi dalam menjalankan kewenangan daerah secara umum merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Biasanya pemerintah masih menerapkan suatu kebijakan terhadap masalah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan agar perundang-undangan sebagai payung hukum yang telah diciptakan dapat memiliki fungsi sesuai dengan maksud dan tujuan. Adapun langkah-langkahnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut peningkatan sosialisasi, sarana pelayanan dan lainnya.

Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dua dampak yang berbeda yaitu dampak positif dan dampak negative. Dampak tersebut bisa dirasakan baik bagi pemerintah maupun bagi publik atau masyarakat, terlebih lagi kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan penarikan retribusi parkir. Masyarakat Kota Batam pada umumnya yang mengikuti penarikan retribusi parkir berlangganan merasa sangat memberatkan jika lagi oleh juru parkir ditempat mereka menitipkan motor. Namun disisi lain, kebijakan parkir berlangganan ini dapat mendatangkan penerimaan yang cukup besar dari sektor retribusi. Kebijakan sistem parkir berlangganan ini sebagai salah satu usaha yang dilakukan pemerintah Kota Batam dalam menambah dan

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batam serta masyarakat dapat menikmati hasilnya dengan adanya fasilitas publik (Novia, 2014). Tujuan dari penelitian ini supaya dapat mendeskripsikan serta menganalisis mengenai sumber pendapatan daerah salah satunya dalam kebijakan parkir berlangganan. Adanya retribusi parkir berlangganan bertujuan menjadi bagian agar pemerintah Kota Batam dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Atas dasar hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM)”. Dari judul tersebut, peneliti lebih fokus untuk melakukan analisis masalah yaitu bagaimana layanan parkir berlangganan yang terdapat di Kota Batam karena parkir berlangganan yang berlaku sejak Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir yang sampai sekarang masih belum efektif serta bagaimana implementasi kebijakan parkir berlangganan tersebut dalam menunjang pendapatan asli daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 Tahun 2018 yang kurang efektif .
2. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam yang tidak maksimal .

1.3 Batasan Masalah

Fokus dari penelitian ini, agar peneliti melihat permasalahan dari penelitian ini dapat dibatasi variabelnya. Batasan masalah yang penulis berikan hanya berkaitan dengan Pelayanan Parkir Berlangganan yang berada di tepi jalan umum Kota Batam yang berlaku sejak 29 Oktober Tahun 2018 pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir yang sekarang diganti menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan parkir berlangganan di tepi jalan umum dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada bagian retribusi parkir di Kota Batam ?
2. Kendala apa yang mempengaruhi pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum di Kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2018 atas Kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2018 kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam;

3. Untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam permasalahan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan parkir berlangganan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Yang menjadi manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Salah satu syarat untuk menempuh kelulusan di Universitas Putera Batam dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
2. Menambah referensi pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam penerapan melakukan penelitian, khususnya mendapatkan gambaran tentang parkir berlangganan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian ini meliputi:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada Universitas sebagai bahan bacaan mahasiswa dan sumber bagi peneliti berikutnya;
2. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Batam untuk kedepannya dalam perencanaan program penyelenggaraan dan retribusi parkir;

3. Sebagai bahan masukan bagi para pembaca untuk meningkatkan keterampilan dan kedisiplinan dalam mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas.